

EXPLORING AND IMPLEMENTING NUSANTARA MULTICULTURALISM IN HISTORY LEARNING IN HIGH SCHOOL

Menggali dan Implementasi Multikulturalisme Nusantara dalam pembelajaran Sejarah di
 SMA

Miskawi^{1a(*)}, Djono^{2b}

¹Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi,

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

^amiskawihistory@gmail.com

^bdjono@staff.uns.ac.id

(*) Corresponding Author

miskawihistory@gmail.com

How to Cite: Miskawi. (2025). Menggali dan Implementasi Multikulturalisme Nusantara dalam pembelajaran Sejarah di SMA doi: 10.36526/js.v3i2.5323

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords:

Multiculturalism, Nusantara,
 Pancasila, History Learning,
 Multicultural Education

Abstract

Indonesia, with its abundant cultural diversity, faces major challenges in implementing multiculturalism, especially among the younger generation. History learning based on the concept of Nusantara multiculturalism is in line with the values of Pancasila. This study aims to explore the concept of Nusantara multiculturalism through historical studies and implement Nusantara multiculturalism in history learning at the high school level, with an emphasis on the application of Pancasila values. The research method used is a literature study, which collects information from various literature related to multiculturalism, Pancasila, and history education. The results of the study show that the concept of Nusantara multiculturalism has been laid as a strong foundation since the Majapahit Kingdom, emphasized by youth organizations and used as a guideline in national and state life based on Pancasila. The implementation of Nusantara multicultural education based on history learning can strengthen students' social awareness and nationalism, although there are challenges in its implementation, such as teacher readiness and curriculum limitations. Therefore, the development of a more inclusive curriculum and training for educators is very necessary..

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki keberagaman yang luar biasa dalam hal suku, tradisi, bahasa, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini menjadi salah satu ciri khas yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Kymlimcka (dalam Handoyo, 2015) memperkirakan bahwa di dunia terdapat 184 negara merdeka, dengan sekitar 600 kelompok bahasa hidup dan 5000 kelompok etnik. Lebih dari itu, Indonesia memiliki seperlima dari jumlah etnis di dunia, dengan lebih dari 1000 etnis atau subetnis yang ada di negara ini (Suryadinata, 2003). Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekayaan sosial, tetapi juga fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia (Peter & Simatupang, 2022).

Keberagaman ini menciptakan tantangan untuk mencapainya keharmonisan, di sinilah konsep multikulturalisme berperan penting. Multikulturalisme merupakan suatu pendekatan untuk menangani perbedaan yang berkaitan dengan ras, golongan sosial-ekonomi, gender, bahasa, budaya, jenis kelamin, dan disabilitas (Steinberg, 2009). Multikulturalisme merujuk pada pandangan atau kebijakan yang menekankan penerimaan terhadap kenyataan keberagaman yang ada di dunia, serta berbagai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini mencakup nilai-nilai, sistem, tradisi,

kebiasaan, dan politik yang dianut oleh berbagai kelompok budaya yang berbeda (M. Atho Mudzhar, 2005). Dengan penerimaan terhadap keberagaman ini, Indonesia dapat mengelola dan merayakan perbedaan, yang pada akhirnya memperkuat fondasi negara yang inklusif dan harmonis

Konsep Nusantara sebagai simbol kesatuan bangsa Indonesia telah diletakkan dasar yang kuat sejak masa kerajaan Majapahit, yang mengakui keberagaman wilayah dan budaya sebagai bagian integral dari satu identitas bangsa. Selain itu, perjuangan untuk menyatukan Nusantara terus berlanjut melalui organisasi-organisasi pemuda pada awal abad ke-20 dan dijadikan sebagai pedoman persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dalam keberagaman, seperti yang diungkapkan oleh Hakim dan Alif Lukmanul (2022), menjadi kunci bagi kehidupan damai di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Multikulturalisme Nusantara, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan kehidupan saling menghormati. Pancasila sebagai dasar ideologi negara membentuk identitas nasional yang inklusif, mempromosikan keadilan sosial, dan mendukung inklusivitas budaya di seluruh masyarakat Indonesia (Pertiwi & Dewi, 2021; Leung & Chiu, 2010).

Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam mendorong pengakuan, penghargaan, dan dukungan aktif terhadap keberagaman identitas budaya dalam masyarakat Indonesia. Madrohim et al. (2021) menjelaskan bahwa Pancasila memberikan landasan moral yang diperlukan untuk menjaga keberagaman ini dengan cara yang justru memperkuat integritas nasional, bukan melemahkannya. Hal ini tercermin dalam semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menerima dan merayakan perbedaan (Purwaningsih & Witro, 2020).

Multikulturalisme Nusantara sangat relevan dalam pembelajaran sejarah di tingkat SMA. Pendidikan multikultural melalui Pancasila mengajarkan generasi muda untuk menjaga identitas budaya sambil menghargai perbedaan, mempromosikan toleransi, dan membangun persatuan di tengah keberagaman (Shabrilia et al., 2022; Setiyonugroho et al., 2022). Konsep Nusantara juga memperkuat identitas nasional dengan mengenalkan berbagai etnis dan budaya Indonesia, serta mempromosikan nilai Pancasila, khususnya "Bhinneka Tunggal Ika," yang memperdalam apresiasi terhadap warisan nasional dan memperkuat rasa kebangsaan (Fahri et al., 2023).

Namun, meskipun Indonesia telah lama mencanangkan nilai-nilai keberagaman dalam semboyan dan konstitusi, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Globalisasi dan arus informasi yang cepat seringkali menyebabkan terjadinya distorsi dalam pemahaman terhadap multikulturalisme. Beberapa segmen masyarakat, terutama kalangan remaja, masih terjebak dalam pemikiran yang sempit dan cenderung mengabaikan pentingnya toleransi dan keberagaman. Selain itu, maraknya intoleransi, ekstremisme agama, dan kesalahpahaman budaya di beberapa wilayah Indonesia semakin memperlihatkan adanya kesenjangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, (Saputra, A. G., et.al, 2023).

Urgensi penerapan multikulturalisme Nusantara semakin jelas mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun nilai keberagaman telah tercantum dalam semboyan dan konstitusi, penerapannya masih terkendala oleh distorsi pemahaman akibat globalisasi dan arus informasi yang cepat. Beberapa segmen masyarakat, terutama remaja, terjebak dalam pemikiran sempit, yang mengarah pada intoleransi dan kesalahpahaman budaya. Oleh karena itu, penerapan multikulturalisme berbasis Pancasila menjadi sangat penting untuk memperkuat integritas nasional dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik Pancasila,

Multikulturalisme Nusantara dan pembelajaran Sejarah (Zed, 2008). Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi: 1) penentuan topik penelitian; 2) eksplorasi informasi dari dokumen yang ditemukan; 3) penentuan fokus penelitian; 4) pengumpulan data terkait literasi sejarah dan penelitian sejarah; 5) persiapan penyajian data; dan 6) penyusunan laporan (Kuhlthau, 2002). Analisis isi digunakan untuk mengolah dan menyusun data yang telah dikumpulkan (Krippendorff, 1993)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep multikulturalisme Nusantara

Konsep Nusantara memiliki signifikansi mendalam dalam sejarah, budaya, dan politik Indonesia, yang mencerminkan visi persatuan di tengah keragaman. Nusantara bukan hanya menjadi simbol kekuatan untuk merangkul keberagaman, tetapi juga penting dalam membangun masyarakat yang kohesif dan harmonis. Istilah Nusantara pertama kali digunakan dalam teks-teks kuno dan sering dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit, yang memandang dirinya sebagai pemersatu berbagai daerah dan budaya di kepulauan Indonesia. Penggunaan istilah ini mencerminkan kesadaran akan keberagaman serta visi untuk mencapainya kesatuan, sebuah prinsip yang tetap relevan dalam konteks Indonesia modern (Ismurdiyahwati & Nasor, 2021).

Nusantara memiliki sejarah panjang, salah satunya tercatat dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada 1336 M, selama pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam sumpah tersebut, Patih Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, mencakup wilayah seperti Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sumpah ini tercatat dalam buku Pararaton (R. Pitono Hardjo Wardoyo, 1965), yang menunjukkan niat besar Majapahit untuk mempererat hubungan antar daerah dan budaya yang ada di kepulauan Indonesia.

Dr. Setiabudi kemudian menggunakan istilah Nusantara untuk merujuk pada pulau-pulau di Asia Tenggara dengan makna yang lebih nasionalis. Dr. Setiabudi mengambil kata tersebut dari bahasa Melayu asli, yaitu "antara," yang kemudian memberi arti baru pada Nusantara, yakni "nusa di antara dua benua dan dua samudra" (Agustina Soebachman, 2014). Istilah ini dengan cepat populer dan digunakan sebagai alternatif nama Hindia Belanda. Menurut Hamka, nenek moyang kita berasal dari berbagai wilayah seperti Thailand, Burma, Kamboja, Laos, dan Indo Cina, yang kemudian berpindah ke berbagai pulau besar di Nusantara, termasuk Sumatra, Jawa, dan Semenanjung Tanah Melayu. Nusantara, yang berarti "pulau antara," merujuk pada kawasan yang terletak di antara Benua Asia dan Australia (Hamka, 2002).

Dalam perkembangannya, persatuan Nusantara di tengah keberagaman dipelopori oleh organisasi-organisasi yang dibentuk oleh elit terpelajar, dengan fokus pada kesadaran hak, identitas, pendidikan, dan reformasi sosial. Gerakan ini menjadi dasar bagi lahirnya organisasi seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang menjadi tonggak awal nasionalisme Indonesia dan mendorong persatuan Nusantara di tengah keragaman budaya, etnis, dan agama. Organisasi kepemudaan memainkan peran krusial dalam perjuangan pemuda Indonesia untuk menyatukan Nusantara dan mencapai kemerdekaan, salah satunya melalui majalah "Indonesia Merdeka" yang menggerakkan semangat persatuan (B. Sularto, 1986; Madhiyah et al., 2021). Puncaknya adalah Sumpah Pemuda 1928 yang semakin mengokohkan tekad persatuan (Suryadinata, 1971; Deswita et al., 2024).

Sarekat Islam, Indische Partij, dan PNI juga memperkuat persatuan dan nasionalisme, melawan penjajahan dan mempromosikan kesatuan antar etnis dan agama. Budi Utomo memainkan peran penting dalam mengelola keragaman dan memperkuat ideologi persatuan, yang tercermin dalam Sumpah Pemuda, serta mendorong kebanggaan budaya dan pendidikan (Shiraishi, 1981). Warisannya terus memperkuat semangat "Bhinneka Tunggal Ika" melalui pendidikan, inklusivitas, dan pengakuan terhadap keragaman identitas Nusantara (Deswita et al., 2024). Konsep ini sangat sejalan dengan simbolisme Nusantara, yang menekankan pentingnya menerima perbedaan sambil tetap bersatu sebagai bangsa (Purwaningsih & Witro, 2020).

Semangat persatuan yang diperjuangkan oleh Budi Utomo ini diteruskan oleh para pemimpin Indonesia pasca-kemerdekaan, seperti Ir. Soekarno, menekankan persatuan nasional sebagai dasar kemerdekaan, dengan Pancasila sebagai ideologi yang mengutamakan persatuan dan keadilan sosial (Kurniawan & Putrawan, 2023). Dalam pidatonya, ia sering mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, dan bahwa perbedaan-perbedaan ini harus dihargai sebagai bagian integral dari identitas bangsa (Soekarno, 1957).

Suharto menggunakan Pancasila untuk stabilitas nasional, meskipun mengorbankan kebebasan demokratis dan menekankan integrasi identitas regional. BJ Habibie memperkenalkan otonomi daerah sambil menjaga persatuan dan mengakui keberagaman budaya sebagai bagian dari identitas Indonesia. Gus Dur mempromosikan pluralisme agama dan budaya untuk menjadikan Indonesia sebagai model Islam moderat yang menyatukan berbagai kelompok (Anwar, 2018). Megawati Sukarnoputri menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutamakan demokrasi, rekonsiliasi, dan dialog antar kelompok budaya dan etnis, memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan nasional (Saddam et al., 2024). Joko Widodo melanjutkan idealisme persatuan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah dan memperkuat kohesi nasional, menghormati budaya lokal sambil memperkuat identitas kolektif Indonesia (Saddam et al., 2024). Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, nama Nusantara diadopsi sebagai nama ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Ibu kota negara ini akan dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara pada tahun 2024, (Amanan, 2022).

Pandangan diatas, Menurut Laegaard (2020), multikulturalisme mencakup dua aspek utama dan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan tindakan negara untuk mendukung keragaman tersebut. Dalam konteks modern, istilah nusantara semakin relevan dalam diskusi tentang identitas nasional, multikulturalisme, dan pembangunan Indonesia, serta berfungsi sebagai simbol yang memperkuat identitas nasional di tengah tantangan global dan regional (Fuadi, 2021). Meskipun demikian, implementasi konsep Nusantara menghadapi tantangan, seperti fragmentasi budaya dan munculnya ideologi radikal yang dapat merongrong prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang makna asli nusantara sangat penting untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan antar kelompok etnis serta menjaga nilai-nilai multikultural yang ada di Indonesia (Setiawan & Stevanus, 2023). Islam Nusantara, sebagai contoh, menekankan sosial, budaya, dan toleransi antar umat beragama, menjadikan Indonesia negara dengan tradisi keagamaan yang inklusif dan adaptif (Luthfi, 2016).

Semangat multikulturalisme yang terkandung dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang dijunjung tinggi dalam kehidupan beragama, mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut untuk membangun bangsa yang harmonis. Keberagaman ini juga tercermin dalam kearifan lokal yang dijaga oleh berbagai komunitas di Indonesia, yang mampu mempertahankan identitas budaya mereka meskipun dihadapkan pada modernisasi (Jamika et al., 2023). Pemikiran Yudi Latif menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu yang mengakui keberagaman sebagai kekuatan. Pancasila, menurut Latif, mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya identitas bangsa dan memperkuat persatuan, sejalan dengan pandangan Soekarno yang menekankan harmoni sosial dan persatuan dalam keragaman (Latif, 2011). Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam memastikan Indonesia tetap bersatu meskipun dihadapkan pada beragam tantangan internal dan eksternal.

2. Pancasila dan Multikulturalisme Nusantara dalam pembelajaran sejarah

Nilai Pancasila, terutama Bhinneka Tunggal Ika ("Unity in Diversity"), menjadi landasan untuk mempersatukan bangsa dalam keragaman. Soekarno menekankan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari banyak kelompok, keberagaman justru memperkuat persatuan. Penerapan

nilai Pancasila dalam pembelajaran sejarah sangat penting untuk mengajarkan siswa bagaimana Indonesia bisa bersatu dalam keberagaman (Soekarno, 1957).

Pemikiran dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid, dan Clifford Geertz semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan keberagaman. Gus Dur, sebagai Presiden Indonesia ke-4 dan tokoh agama, memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Gus Dur menegaskan bahwa Indonesia harus menghargai keragaman sebagai kekayaan dan kekuatan, serta tidak membiarkan perbedaan agama, etnis, atau budaya menjadi alasan perpecahan. Gus Dur berpendapat bahwa Pancasila adalah dasar yang bisa memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman Indonesia, menanamkan nilai toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan konsep Pancasila sebagai landasan untuk memperkokoh persatuan di tengah keragaman yang ada (Wahid, 2003).

Selain itu, Nurcholish Madjid mengajarkan tentang Islam yang inklusif yang sangat menghargai pluralisme. Madjid percaya bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk harus mampu menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk memperkuat ikatan sosial dan persatuan nasional. Ia juga mendukung penerapan Pancasila sebagai panduan dalam membangun kehidupan multikultural yang harmonis. Madjid menekankan pentingnya toleransi agama, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat (Madjid, 2000). Madjid melihat Pancasila sebagai dasar yang dapat membimbing bangsa dalam merangkul keberagaman tanpa mengorbankan persatuan.

Clifford Geertz, seorang antropolog yang meneliti masyarakat Indonesia, menekankan bahwa keberagaman budaya adalah elemen yang sangat penting dalam membentuk identitas Indonesia. Geertz berpendapat bahwa Indonesia harus merayakan keragaman budaya dan menjaga keberagaman agama serta etnis sebagai bagian dari fondasi sosial yang kokoh. Geertz melihat Indonesia sebagai negara dengan identitas budaya yang sangat plural, yang memerlukan penghargaan terhadap kebudayaan lokal untuk memperkuat kesatuan sosial (Geertz, 1960). Geertz menegaskan bahwa keberagaman budaya adalah sumber kekuatan Indonesia dan harus dijaga dalam rangka memperkokoh fondasi sosial negara.

Selain itu, pendapat Wasino et al. (2019) mengenai pendidikan Pancasila juga sangat mendukung penerapan nilai-nilai ini dalam pendidikan sejarah. Menurut Wasino et al., Pancasila berfungsi untuk menanamkan nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Pendidikan Pancasila dalam sejarah mengajarkan siswa untuk melihat keberagaman sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Melalui narasi sejarah yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini, siswa dapat belajar dari contoh-contoh sejarah bagaimana berbagai kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan dan bekerja sama, saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, Fauzi et al. (2022) menyatakan bahwa mempelajari interaksi sejarah antar kelompok etnis yang berbeda akan mengajarkan siswa tentang toleransi, rasa hormat, dan keadilan sejarah. Pendidikan sejarah yang berbasis pada multikulturalisme memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat sejarah tidak hanya dari satu sudut pandang tetapi juga untuk menggali perspektif yang lebih beragam.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran sejarah, perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan. Fauzi et al. (2022) mengungkapkan bahwa kurikulum sejarah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip multikultural dapat membantu siswa memahami dan mengapresiasi keberagaman. Kurikulum yang mencakup peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang mencerminkan kerjasama antar budaya akan memberikan siswa contoh konkret tentang bagaimana persatuan dan kerja sama terwujud dalam sejarah bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus lebih dari sekadar penyampaian fakta, melainkan juga sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan kebersamaan dalam keberagaman.

Menurut Mashuri et al. (2024), Perdana et al., (2018) menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan pembelajaran berbasis proyek sangat penting dalam membantu siswa memahami konsep multikulturalisme dalam sejarah. Metode ini memperkuat keterlibatan siswa dengan isu-isu multikultural, mendorong mereka untuk berempati terhadap berbagai kelompok dalam sejarah. Melalui permainan peran, siswa dapat memerankan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang budaya, yang akan membantu mereka lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut dalam sejarah. Pendekatan ini tidak hanya membekali siswa dengan pemahaman sejarah, tetapi juga dengan keterampilan sosial dan empati yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pandangan diatas, maka Strategi pengajaran harus berfokus pada empati sejarah, yang memungkinkan siswa untuk memahami pengalaman kelompok etnis yang berbeda. Pengembangan kurikulum sejarah yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dapat membantu menumbuhkan toleransi dan pemahaman tentang kompleksitas identitas bangsa yang majemuk (Manalu et al., 2024). Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka yang berupaya mengembangkan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila (Mahfud et al., 2024).

Keterlibatan komunitas juga sangat berperan dalam memperkaya pemahaman siswa tentang multikulturalisme. Ulfa et al. (2021) mengusulkan agar siswa diajak berinteraksi langsung dengan komunitas lokal mereka melalui kunjungan lapangan, festival budaya, dan proyek kolaboratif. Pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat langsung bagaimana keberagaman dihargai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat sejalan dengan nilai Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan kesadaran sosial. Dengan keterlibatan komunitas, siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman nyata yang memperkaya pemahaman mereka tentang dinamika sosial yang ada di masyarakat.

3. Tantangan dan urgensi mengajarkan multikulturalisme Nusantara

Integrasi multikulturalisme Nusantara dan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas di Indonesia sangat penting mengingat keberagaman budaya yang kaya di negara ini. Keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia membentuk sebuah mozaik budaya yang dinamis, mencerminkan kekuatan sosial yang dapat dijadikan dasar untuk membangun kesadaran dan toleransi dalam masyarakat. Namun, meskipun sangat mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran sejarah, tantangan besar tetap ada dalam pengaplikasiannya. Sebagian besar tantangan ini berkaitan dengan kesiapan guru, keterbatasan kurikulum yang ada, serta resistensi dari siswa yang belum sepenuhnya terbuka terhadap keberagaman yang ada.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengajarkan multikulturalisme adalah kesiapan guru dalam mengajar dengan pendekatan yang sensitif terhadap keragaman. Pengembangan kompetensi multikultural di kalangan pendidik sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh GÜngör dan Çakir. Mereka menekankan bahwa calon guru harus mengembangkan kepekaan terhadap keragaman budaya untuk dapat mengelola dan merespons lingkungan kelas yang beragam secara efektif (Güngör & Çakir, 2021). Ini semakin ditekankan oleh Durand dan Tavaras, yang menekankan perlunya refleksi kritis di kalangan pendidik untuk mendukung praktik pengajaran multikultural yang menantang kenistaan sistemik dan mempromosikan keadilan sosial (Durand & Tavaras, 2020). Strategi semacam ini sangat diperlukan di sekolah-sekolah perkotaan, di mana keragaman sering kali lebih terlihat dan tantangan sosial lebih terasa.

Banyak guru yang merasa kurang percaya diri dalam mengajarkan tema-tema multikultural karena keterbatasan pelatihan yang mereka terima, sebagaimana diungkapkan oleh Gloria et al. (2000). Banyak pendidik yang tidak memiliki keterampilan untuk menangani berbagai perspektif budaya yang ada di kelas. Untuk itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk

meningkatkan kompetensi multikultural di kalangan guru, agar mereka dapat menyampaikan materi dengan lebih baik dan sensitif terhadap dinamika sosial yang terjadi di kelas (Gloria et al., 2000).

Selain itu, kurikulum yang ada saat ini juga belum sepenuhnya mendukung pengajaran multikulturalisme secara optimal. Setiyonugroho et al. (2022) menyatakan bahwa meskipun pendidikan multikultural telah diakui, kurikulum yang diterapkan seringkali terbatas dan lebih menekankan pada ujian standar. Kurikulum yang kaku ini membatasi kesempatan untuk mengintegrasikan berbagai narasi sejarah yang mewakili keberagaman etnis dan budaya di Indonesia. Kegagalan untuk memasukkan narasi yang lebih pluralistik dalam kurikulum sejarah dapat memperkuat pandangan yang monolitik terhadap sejarah Indonesia, yang justru bertentangan dengan tujuan pendidikan multikulturalisme.

Selain itu, tantangan lainnya adalah resistensi yang mungkin muncul dari siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang homogen. Siswa yang tidak terbiasa dengan berbagai perspektif budaya mungkin menunjukkan ketidakterbukaan terhadap materi yang mengangkat tema-tema multikultural. Menurut Simons et al. (2023), hal ini disebabkan oleh kurangnya paparan terhadap keberagaman dan pengaruh stereotip yang mungkin terbentuk sejak dini. Dalam hal ini, keterlibatan guru sangat penting untuk mengelola dinamika kelas yang bisa jadi penuh tantangan, sambil memastikan bahwa kelas tetap inklusif dan siswa dapat belajar dengan perspektif yang lebih terbuka.

Mengingat pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun masyarakat yang harmonis, ada sejumlah urgensi yang harus diperhatikan. Salah satu urgensinya adalah kebutuhan untuk merespons perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Indonesia, dengan keberagaman sosial dan budaya yang sangat besar, memerlukan pendidikan yang dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Prabowo (2023) menjelaskan bahwa pendidikan sejarah berbasis multikulturalisme Nusantara dan nilai Pancasila sangat penting untuk menumbuhkan rasa toleransi dan memahami kontribusi berbagai kelompok etnis dalam sejarah bangsa. Hal ini bukan hanya berfungsi sebagai upaya untuk merayakan keberagaman, tetapi juga sebagai langkah untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Pentingnya pendidikan berbasis Pancasila juga disoroti oleh Ama dan Wulandari (2020), yang berpendapat bahwa mengajarkan sejarah dengan lensa multikultural adalah cara yang efektif untuk menciptakan kesetaraan budaya di kalangan siswa. Menurut mereka, penerapan nilai Pancasila dalam pembelajaran sejarah akan memperkuat identitas nasional yang berlandaskan pada penghargaan terhadap keberagaman. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam memperkokoh persatuan nasional di tengah masyarakat yang sangat pluralistik. Dengan mengenalkan siswa pada narasi sejarah yang menghargai berbagai kelompok etnis, siswa dapat mempelajari nilai-nilai penting seperti toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, yang akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis.

Untuk memastikan bahwa nilai Pancasila dan multikulturalisme dapat diintegrasikan dengan baik dalam pembelajaran sejarah, penting untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan inklusif. Fauzi et al. (2022) mengungkapkan bahwa kurikulum yang memasukkan prinsip-prinsip multikultural dapat membantu siswa lebih memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Kurikulum yang lebih berfokus pada peristiwa sejarah yang melibatkan berbagai kelompok budaya dan etnis akan memberi siswa gambaran konkret tentang bagaimana persatuan dan kerja sama antara berbagai budaya dapat tercapai. Sebagai contoh, sejarah perlawanan bersama dalam menghadapi penjajahan oleh berbagai kelompok etnis dapat dijadikan contoh konkret untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan pembelajaran berbasis proyek sangat penting untuk mengembangkan keterlibatan siswa. Mashuri et al. (2024) menjelaskan bahwa metode partisipatif dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu multikultural, memungkinkan mereka untuk mengembangkan empati terhadap kelompok lain yang ada dalam sejarah. Melalui permainan peran, siswa dapat memerankan tokoh-

tokoh sejarah dari berbagai latar belakang budaya, yang akan memperdalam pemahaman mereka mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Ini akan memperkaya pengalaman belajar siswa, sekaligus membantu mereka memahami pentingnya hidup dalam keberagaman.

Agar pembelajaran sejarah lebih efektif, keterlibatan komunitas juga sangat berperan. Ulfa et al. (2021) mengusulkan agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan komunitas lokal mereka melalui kegiatan seperti kunjungan lapangan, festival budaya, dan proyek kolaboratif. Pembelajaran berbasis komunitas ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana keberagaman diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini sangat sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kesadaran sosial, serta memberikan pengalaman yang lebih konkret bagi siswa untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar mereka.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengajaran multikulturalisme Nusantara berbasis nilai Pancasila dalam pendidikan sejarah di sekolah menengah atas memang besar, namun bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Pengembangan profesional bagi guru, kurikulum yang lebih fleksibel dan inklusif, serta keterlibatan komunitas yang lebih aktif merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan implementasi. Melalui pendidikan sejarah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat memperkuat nilai toleransi, kerjasama, dan persatuan di tengah keberagaman, sekaligus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

PENUTUP

Konsep multikulturalisme Nusantara memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan Indonesia yang beragam sejarah, budaya, dan politik Indonesia, yang mencerminkan visi persatuan di tengah keragaman sejak masa kerajaan Majapahit hingga pemerintahan Jokowi Widodo. Nilai Pancasila, terutama prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang kohesif dan harmonis. Menghargai keberagaman etnis, budaya, dan agama sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Untuk itu, penerapan multikulturalisme dalam pendidikan sejarah yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat penting guna membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran sosial, menghargai perbedaan, serta memperkuat identitas nasional Indonesia yang inklusif.

Namun, tantangan dalam implementasi multikulturalisme di pendidikan sejarah, seperti kesiapan guru, keterbatasan kurikulum, dan resistensi siswa terhadap keberagaman, perlu diatasi melalui pengembangan kompetensi multikultural bagi pendidik, kurikulum yang lebih inklusif, dan metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam memahami sejarah dari berbagai perspektif budaya. Melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar untuk hidup dalam keberagaman, memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerja sama, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanan. (2022). Nusantara Dari Satu Kawasan Sampai Nama Ibu Kota Negara. Vol. 4 No.3 Edisi 1 April. *Ensiklopedia of Journal*.
- Agustina, Soebachman. (2014). *Sejarah Nusantara berdasarkan Urutan Tahun*. Yogyakarta: Syura Media Utama.
- Ama, S. and Wulandari, T. (2020). The socialization of multiculturalism values based on abdurrahman wahid's thoughts in history learning to create student cultural equality.. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.054>
- B. Sularto. (1986). *Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda*. Balai Pustaka.
- C. Ricklefs. (1988). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Durand, T. and Tavaras, C. (2020). Countering complacency with radical reflection: supporting white teachers in the enactment of critical multicultural praxis. *Education and Urban Society*, 53(2), 146-162. <https://doi.org/10.1177/0013124520927680>
- Eka, A., Budi, S., & Purwaningrum, L. (2019). Communicating islam nusantara through comic.. <https://doi.org/10.4108/eai.27-4-2019.2286789>
- Fuadi, M. (2021). Islamization and the transition of power in nusantara according to kiai abul fadhols ahla al-musamarah. *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 80-104. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>
- Fauzi, M., Astuti, T., & Atmadja, H. (2022). Pattern of inculcating multicultural values in students at state senior high school 1 kendal. *Journal of Educational Social Studies*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.15294/jess.v11i1.52941>
- Fuadi, S. and Elsyam, R. (2024). The centrality of the role of pai teachers in multicultural education practices in wonosobo regency public schools. *Jurnal Progress Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.31942/pgrs.v12i1.10244>
- Farouq, U., Widana, I., & Simatupang, H. (2022). Pancasila as the foundation of the defense of the state in the face of the threat of distegration of the indonesian nation. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(1), 134-141. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i1.382>
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Glencoe Free Press.
- Güngör, T. and Çakir, Ç. (2021). Diversity management and cultural competency of teacher candidates in blacksea region of turkey. *Journal of Education in Black Sea Region*, 6(2), 212-228. <https://doi.org/10.31578/jeps.v6i2.243>
- Gloria, A., Rieckmann, T., & Rush, J. (2000). Issues and recommendations for teaching an ethnic/culture-based course. *Teaching of Psychology*, 27(2), 102-107. https://doi.org/10.1207/s15328023top2702_05
- Hardjowardojo, Pitono.R. (1965). *Pararaton*. Yogyakarta: Bhratara.
- Hamka. 2002. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. M.
- Hutagalung, S., Rumbay, C., & Ferinia, R. (2022). Islam nusantara: an integration opportunity between christianity and culture in indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7206>
- Ismurdiyahwati, I. and Nesor, A. (2021). Motifs in east java traditional batiks.. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.061>
- Jamika, F., Barlian, E., Erianjoni, E., Umar, I., & Fatimah, S. (2023). Wisdom local tegal city communities in the modernization era and strategies to maintain it. *Amplitudo Journal of Science & Technology Innovation*, 2(1), 29-33. <https://doi.org/10.56566/amplitudo.v2i1.17>
- Kuhlthau, 2002. *Teaching the Library Research*. USA: Scarecrow Press Ins.
- Krippendorff (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Leung, K., & Chiu, C. Y. (2010). *Multiculturalism and Social Harmony in Indonesia: The Role of Pancasila*. *Journal of Intercultural Studies*, 24(3), 189-201.
- Lægaard, S. (2020). *The dual aspects of multiculturalism: Recognition and state action*. *Journal of Political Philosophy*, 28(1), 89-105.
- Lutfillah et al., 2022. Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1*. 212-221.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Luthfi, K. (2016). Islam nusantara: relasi islam dan budaya lokal. *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>
- Lutfillah, N., Mangoting, Y., & Wijaya, R. (2022). The meaning taxpayer compliance in tri hita karana's perspective., 148-155. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-026-8_17
- Madjid, N. (2000). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Kalam.

- Madhiyah, FT., M. Humaidi., Yanuarti., MH. 2021. Mohammad Tabrani Soejowitirjto: Peran Dalam Kongres Pemuda 1925-1928. PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah: 3 (2), 112-130.
- Madrohim, D., Hidayati, N., & Sutrisno, R. (2021). *Pancasila and the Preservation of Cultural Diversity: Strengthening National Integrity through Unity in Diversity*. Jurnal Kebudayaan Indonesia, 17(4), 58-71.
- Makin, A. (2019). Returning to the religion of abraham: controversies over the gafatar movement in contemporary indonesia. *Islam and Christian–muslim Relations*, 30(1), 87-104. <https://doi.org/10.1080/09596410.2019.1570425>
- Mashuri, S., Futaqi, S., Ruslin, R., Sugiyar, S., Fakhurrozi, H., & Rofiq, A. (2024). Multicultural-based public policy: the experience of indonesia in managing diversity for national resilience. *Technium Social Sciences Journal*, 55, 394-404. <https://doi.org/10.47577/tssj.v55i1.10523>
- Mahfud, H., Marmoah, S., Poerwanti, J., Sukarno, S., Supianto, S., & Istiyati, S. (2024). Implementation of fostering an attitude of tolerance in merdeka curriculum on the science learning process. *Jurnal Penelitian Pendidikan Ipa*, 10(11), 8454-8460. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i11.9316>
- Manalu, D., Diansyah, A., & Gultom, I. (2024). Exploration of multicultural approaches in history learning in multiethnic contexts: case study at sman 14 medan. *Puteri Hijau Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 345. <https://doi.org/10.24114/ph.v9i2.57869>
- Perdana, Y., Sumargono, S., & Rachmedita, V. (2019). Integrasi sosiokultural siswa dalam pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 79-98. <https://doi.org/10.21009/jps.082.01>
- Peter & Simatupang, (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*. <http://repository.uki.ac.id/8567/1/KeberagamanBahasaDanBudayaSebagaiKekayaan.pdf>
- Purwaningsih, R. and Witro, D. (2020). Islam nusantara in slogan bhinneka tunggal ika: al-quran perspective. *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3301>
- Prabowo, M. (2023). Multicultural education based on local history material of the islamic sultanate in west kalimantan. *Ijgie (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 4(2), 351-361. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v4i2.2546>
- Purwaningsih, R. and Witro, D. (2020). Islam nusantara in slogan bhinneka tunggal ika: al-quran perspective. *Cakrawala Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3301>
- Sazali, H., Sahirman, S., Tantawi, I., & Lawang, K. (2023). The urgency of the relationship of ulama and government in the development of religious diversity in indonesia. *At-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 316-327. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6871>
- Saputra, A. G., Juliansyah, S. C., & Athayla, S. (2023). Pendidikan Pancasila dalam era multikulturalisme: Membangun toleransi dan menghargai keberagaman. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 1-10. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia.
- Setiawan, D. and Stevanus, K. (2023). Significance of islam nusantara values in an indonesian multicultural society. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 203-214. <https://doi.org/10.22452/jat.vol18no1.17>
- Setiyonugroho, P., Umasih, U., & Kurniawati, K. (2022). Integration of multicultural education values in history teaching. *Journal of Education Research and Evaluation*, 6(2), 280-288. <https://doi.org/10.23887/jere.v6i2.43483>
- Simons, L., Schoneman, S., Hoffman, M., Beller, K., & Blank, N. (2023). Reframing cultural competence and civic engagement: a replication study of high impact practices in undergraduate psychology courses. *European Journal of Education Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.46827/ejes.v10i2.4660>

- Soekarno, (1957). *Pidato Kenegaraan: Indonesia Merdeka*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Shabrilia, F., Maheswari, N., Adhiatma, T., Tanaya, M., & Pandin, M. (2022). Association between cultural awareness and nationalism of millennial generation in the digital era. *Academy of Education Journal*, 13(2), 224-236. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i2.1021>
- Steinberg, R. Shirley. 2009. *Perkembangan Multikulturalisme*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Tim Penulis JNM, (2015). *Gerakan Kultural Islam Nusantara*. JNM dan Mukhtammar ke-33 NU
- Tumonggor, M., Karafet, T., Hallmark, B., Lansing, J., Sudoyo, H., Hammer, M., ... & Cox, M. (2013). The Indonesian archipelago: an ancient genetic highway linking Asia and the Pacific. *Journal of Human Genetics*, 58(3), 165-173. <https://doi.org/10.1038/j>
- Ulfa, E., Djubaedi, D., Sumarna, C., Fatimah, S., Suklani, S., & Hidayat, A. (2021). The role of teachers in fostering religious multiculturalism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 349. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.3065>
- Wasino, W., Kurniawan, E., & Shintasiwi, F. (2019). Religious radicalism prevention model through multicultural dialog in Pancasila and civic education lectures.. <https://doi.org/10.4108/eai.24-10-2019.2290571>
- Wahid, A. (2003). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Gus Dur*. Mizan.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.